

30f.7
Pus
P e



LAPORAN PENELITIAN

PEMBERDAYAAN PRANATA SOSIAL SEBAGAI WAIHANA KONSILIASI DI WILAYAH PESISIR JAWA TENGAH

OLEH

Drs. Budi Puspo P, M.Hum

Dra. Ida Hayu H, MM

Drs Rihandoyo, MM

DIBIYAI OLEH BAGIAN PROYEK PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA
MANUSIA, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2001

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Oktober 2001

UPT-PSIAK-UNDIP

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA

Judul	PEMBERDAYAAN PRANATA SOSIAL SEBAGAI WAHANA KONSILIASI DI WILAYAH PESISIR JAWA TENGAH
Kategori Penelitian	Pengembangan Ilmu Sosial
Ketua Peneliti	
Nama	Drs. Budi Puspo P. M. Hum.
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pangkat/Golongan	Penata Muda/ III B/nip
Jabatan	Lektor Muda
Fakultas	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi	Universitas Diponegoro
Anggota Peneliti	2 Staf Pengajar
Bidang Yang Diteliti	Konflik Sosial
Lokasi Penelitian	Wilayah Pesisir Jateng
Lama Penelitian	8 Bulan
Biaya Penelitian	Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)
Dibiayai Melalui Proyek	Berbagai Bidang Ilmu Tahun 2000/2001

Semarang, Oktober r 2001

Mengetahui
Dekan

Drs. H. Abdurrahman Wadajuri
NIP. 130 324 153



Ketua Peneliti

Drs. Budi Puspo P. M. hum
NIP. 131 875 488

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Diponegoro

Prof. Drg. Ign. Riwanto, Sp.BD

NIP. 130 529 454



RINGKASAN

PEMBERDAYAAN PRANATA SOSIAL SEBAGAI WAHANA KONSILIASI DI WILAYAH PESISIR JAWA TENGAH. Budi Puspo, Ida Hayu, Rihandoyo, 2001, 40 halaman

Masyarakat pada dasarnya sebagai sebuah sistem sosial, yang memiliki banyak elemen dan keaneka ragaman fungsi, namun saling terkait sehingga mampu menciptakan keseimbangan, keterorganisasian, keteraturan dan dinamika.

Konflik yang berubah menjadi tindak kekerasan/kerusuhan dalam masyarakat bila dipandang sebagai sistem sosial, diduga karena elemen sistem (pranata sosial) yang tidak berfungsi, atau bahkan hilang/mati. Sehingga sistem menjadi tidak seimbang. Untuk membentuk keseimbangan kembali, sistem sosial membutuhkan tindakan/penyesuaian dalam jangka waktu yang cukup lama.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk/tipologi konflik yang terjadi dan bagaimanakah peranan pranata sosial (norma dan lembaga sosial) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk: mengidentifikasi determinan dan tipologi konflik dan tidak kekerasan, serta pranata sosial (norma dan lembaga) yang mungkin dapat diberdayakan sehingga mampu berfungsi sebagai wahana konsiliasi

Penelitian ini didisain secara kualitatif dengan metode diskursus.

Populasi dalam penelitian ini adalah kasus konflik/kekerasan yang terjadi di Kabupaten/Kota di pesisir Jateng antara tahun 1999-2000, Data diambil berdasarkan laporan informan di lapangan dan artikel. Teknik analisis yang digunakan adalah diskursus (discourse analysis).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dan tindak kekerasan yang banyak terjadi di pesisir Jawa Tengah disebabkan oleh” Lemahnya pemahaman terhadap demokrasi dalam berpolitik sehingga sering terjadi konflik antar pendukung parpol. Konflik dan tindak kekerasan juga sering timbul karena kurangnya informasi dan sulitnya mengakses informasi sehingga masyarakat mudah terprovokasi. Silaturahmi atau halal bil halal antar pendukung partai merupakan pranata sosial yang dapat dijadikan alternatif untuk melakukan konsiliasi antar pendukung parati

SUMMARY

EMPOWERING SOCIAL VALUE ON CONCILIATION MEDIA IN COASTAL AREAS CENTRAL JAVA, Budi Puspo P, Ida Hayu, Rihandoyo, 2001, 44 pages

Every society has a social systems in which they interact based on equilibrium systems. These means that society could build the balance, organization, regularity and dynamic attitude. Conflict among them could be seen as part of their social system which's their element is malfunction. In order to rebuild the new social system need justification in the quiet a long time.

The focus of these research is understanding structure and typology of conflict and how does the social norms could be decrease the tension of such conflict. So, the purpose are identify the determinants of such conflict and explore the power of social value in handling the conflict in the society.

The design of research deal with qualitative research by using discourse analysis especially the conflict that's already happened since 1999-2000 in coastal areas Central Java Province. Most data are collected through field work and collected an article and news paper.

The results showed that most conflict was happended because most of society hasn't has the knowledge on the concept of democratisation. These conditions could brought the horizontal conflict among Party members. It also showed that lack of information access on political knowledge could support the political conflict. In order to resolve the problem are needed to empower the social systems. By these solution could build similar understanding on creating a conducive situation among political party.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah, SWT, atas rahmat dan karuniaNya, kepada Dikti dan Lembaga Penelitian Undip, atas bantuannya kami ucapkan terimakasih, sehingga laporan tentang "Pemberdayaan Pranata Sosial Sebagai Wahana Konsiliasi Di Wilayah Jateng". dapat diselesaikan.

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih obyektif terhadap kondisi Konflik di Pesisir Jateng yang swsungguhnya, sehingga dapat memberikan arahan/masukan dalam pemahaman tipologi konflik yang akan sangat bermanfaat dalam penanganan konflik di wilayah pesisir Jawa Tengah

Diakui bahwa kajian terhadap konflik dan penangannya ini jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak, guna penyempurnaan laporan ini.

Semarang, Oktober 2001

Peneliti
Budi Puspo, dkk

DAFTAR ISI

JUDUL		ii
PENGESAHAN		iii
RINGKASAN		v
SUMMARY		vi
KATA PENGANTAR		vii
DAFTAR ISI		viii
DAFTAR TABEL		
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar belakang	1
	B. Rumusan Masalah	2
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	3
BAB III	TUJUAN DAN MANFAAT	6
BAB IV	METODE PENELITIAN	7
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Deskripsi Wilayah Jawa Tengah	9
	B. Kependudukan	11
	C. Pekerjaan	19
	D. Kriminalitas	23
	E. Konflik Politik Di Desa Dongos	30
	F. Konflik Pertunjukan dari Tegal	34
	G. Konflik di Peklongan	37
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	39
	B. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

1	Luas Penggunaan Lahan Menurut Kabupaten/Kota	10
2	Penduduk Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota	11
3	Penduduk Jawa Tengah berumur 10 Tahun ke Atas	12
4	Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota	13
5	Penduduk Umur 10+th Menurut Golongan Umur	14
6	Penduduk Umur 10+th Termasuk Angkatan Kerja	15
7	Penduduk Umur 10+th menurut Golongan Umur	16
8	Penduduk Umur 10+th menurut Status Pekerjaan	17
9	Penduduk Umur 10+th menurut Lapangan Pekerjaan	19
10	Penduduk Umur 10+th menurut Pendidikan	21
11	Pencari Kerja Yang Berhasil Ditempatkan	22
12	Tindak Perkara Pidana Di Jateng	23
13	Perkara Perdata Di Jateng	26
14	Banyaknya Kejahatan Di Jateng	28

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya tindak kekerasan/kerusakan di beberapa Dati II Propinsi Jawa Tengah akhir-akhir ini, perlu mendapat perhatian yang serius dan kajian dengan wacana yang lebih mendalam dari pada hanya sekedar menjelaskan konflik terjadi karena ketimpangan sosial-ekonomi, distribusi kekuasaan, pemerataan pendapatan, pelanggaran hukum.

Konflik yang muncul dalam bentuk kekerasan di Pemalang, Pekalongan, Tegal, Jepara dan di wilayah Pesisir Jawa Tengah tergolong rawan konflik, meskipun secara historis konflik di wilayah pesisir lebih banyak disebabkan perebutan akses ekonomi. Namun bukan tidak mungkin bahwa kekerasan dan kerusakan yang menimpa beberapa Dati II sebagaimana tersebut di atas, merupakan indikasi melemahnya peran/fungsi pranata sosial (lembaga sosial) yang hidup di lingkungan masyarakat

Integrasi dan stabilitas masyarakat sangat diperlukan dalam menunjang proses pembangunan, namun bukan berarti alergi terhadap perubahan bahkan selalu menekan konflik, perbedaan pendapat dan kepentingan. Konflik, perbedaan kepentingan juga dibutuhkan untuk menciptakan iklim demokrasi dan menumbuhkan kehidupan yang harmonis. Pada sisi lain konflik yang berkepanjangan juga sangat merugikan, karena akan menimbulkan kerusakan, disintegrasi yang pada gilirannya dapat menghambat pembangunan, bahkan dapat menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini.

Penjelasan dan penanganan konflik yang terjadi di wilayah pesisir Jawa Tengah khususnya di Kabuapten Jepara, Pekalongan, Tegal yang dijadikan sebagai fokus obyek penelitian, akan lebih komprehensif manakala dianalisis secara sistemik (pembahasan kaitan intern dan ekstern) dengan menggunakan konsep Parson (1985) yang menyatakan bahwa konflik sebagai bagian dari sistem sosial.

Masyarakat pada dasarnya sebagai sebuah sistem sosial yang memiliki banyak elemen dan keaneka ragaman fungsi, namun saling terkait sehingga mampu menciptakan keseimbangan, keterorganisasian, keteraturan dan dinamika.

Konflik yang berubah menjadi tindak kekerasan/kerusuhan dalam masyarakat bila dipandang sebagai sistem sosial, diduga karena elemen sistem (pranata sosial) yang tidak berfungsi, atau bahkan hilang/mati. Sehingga sistem menjadi tidak seimbang. Untuk membentuk keseimbangan kembali, sistem sosial membutuhkan tindakan/penyesuaian dalam jangka waktu yang cukup lama.

Bertolak dari cara pandang bahwa masyarakat sebagai sistem sosial yang memiliki kebudayaan yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, maka melemahnya/ tidak berfungsinya beberapa elemen kebudayaan yang ada di dalam masyarakat (norma dan lembaga sosial) menyebabkan anggota masyarakat kehilangan arah dalam memecahkan permasalahan dan konflik yang mereka hadapi.

Lemahnya peran/fungsi norma dan lembaga lembaga sosial sebagai wahana konsiliasi sekaligus pengendali konflik menyebabkan konflik/perbedaan kepentingan tidak terpecahkan dan berubah menjadi kerusuhan, kekerasan dan tindak anarki lainnya. Oleh sebab itu penanganan konflik dengan menggunakan cara pemberdayaan norma dan lembaga sosial yang ada dalam masyarakat sangat penting karena lebih lestari dari pada penanganan konflik dengan pendekatan keamanan.

B. Perumusan Masalah.

Permasalahan yang akan diteliti mencakup:

1. Mengapa di Kabupaten Jepara, Pekalongan dan Tegal sering muncul kerusuhan dan kekerasan ?
2. Bagaimanakah bentuk/tipologi konflik yang terjadi?
3. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya konflik dan tindak kekerasan tersebut?
4. Bagaimanakah peranan pranata sosial (norma dan lembaga sosial) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat.